

PANDANGAN PERSERIKATAN GOEROE HINDIA BELANDA DALAM MAJALAH *MEDAN GOEROE HINDIA* TERHADAP POLITIK PENDIDIKAN BAHASA BELANDA (1915-1921)

THE VIEW OF *PERSERIKATAN GOEROE HINDIA BELANDA* IN *MEDAN GOEROE HINDIA* MAGAZINE ON THE POLITICS OF THE DUTCH LANGUAGE EDUCATION (1915-1922)

Oleh: Naafi' Al-haq Apriliano dan Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd, UNY
napriliano@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kebijakan politik pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi, (2) perkembangan organisasi PGHB dan majalah *Medan Goeroe Hindia*, (3) pandangan PGHB terhadap pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi dalam majalah *Medan Goeroe Hindia*. Metode yang digunakan pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, historiografi. Hasil penelitian (1) Pemerintah kolonial menyelenggarakan pendidikan bahasa Belanda secara terbatas bagi pribumi, (2) Organisasi PGHB didirikan di Magelang oleh guru-guru pribumi, organisasi memperjuangkan nasib guru-guru pribumi serta pendidikan khususnya pendidikan bagi pribumi, dalam memperjuangkan aspirasinya PGHB mendirikan majalah yaitu *Dwidja Oetama* yang berganti nama menjadi *Medan Goeroe Hindia* yang berfungsi sebagai organ PGHB, (3) PGHB melalui majalah *Medan Goeroe Hindia* menekankan pentingnya pendidikan bahasa Belanda bagi kemajuan kaum pribumi, sehingga mereka berharap pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi.

Kata Kunci: Politik pendidikan bahasa Belanda, PGHB, *Medan Goeroe Hindia*.

Abstract

This study aimed to find out: (1) the policy on the politics of the Dutch language education for indigenous people, (2) the development of the organization of PGHB (*Perserikatan Goeroe Hindia Belanda*) and *Medan Goeroe Hindia* magazine, and (3) the view of PGHB on the Dutch language education for indigenous people in *Medan Goeroe Hindia* magazine. The method used in this undergraduate thesis the selection of a topic, the collection of sources, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study were as follows. (1) The colonial government conducted the Dutch language education in a limited way for indigenous people. (2) The organization of PGHB was established in Magelang by indigenous teachers. This organization struggled for the fate of indigenous teachers and fought for education indigenous people. In striving for its aspiration PGHB established a magazine called *Dwidja Oetama*, which changed its name to *Medan Goeroe Hindia*, which functioned as an organ of PGHB. (3) PGHB through *Medan Goeroe Hindia* magazine emphasized the importance of the language Dutch education for the advancement of indigenous people, so that they hoped the Dutch East Indies colonial government extended the Dutch language education for indigenous peoples.

Keywords: *politics of Dutch language education, PGHB, Medan Goeroe Hindia*

PENDAHULUAN

Sebelum abad ke 20 pemerintah kolonial menjalankan kebijakan politik di Hindia Belanda bersandar kepada prinsip ekonomi liberal dimana pemerintah kolonial menganggap Hindia Belanda sebagai *wingewest* atau daerah yang menguntungkan (Marwati, 2008: 354). Baru menjelang abad ke 20 mulai timbul perhatian mengenai tanah Hindia oleh Mr. C. Th. van Deventer yang menulis mengenai keadaan di Hindia Belanda (Juniarti, 2004: 94). Akan tetapi kebanyakan masyarakat Eropa terutama di Belanda tidak tertarik dengan keadaan Hindia Belanda karena masyarakat Eropa pada masa itu adalah masyarakat tertutup.

Keadaan itu perlahan berubah pada awal abad 20 seiring dengan perubahan kebijakan politik Belanda, akibat perubahan golongan yang menguasai parlemen. Parlemen yang dikuasai oleh Partai Kristen Belanda menghendaki perubahan dalam sistem pengelolaan tanah jajahan. Golongan ini kemudian mengusulkan program politik etis (Gorcum, 1987: 18). Puncaknya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda, mengenai politik balas budi bagi Hindia Belanda (Amir, 1987: 176).

Pendidikan menjadi salah satu program yang digaungkan pada masa

politik etis terutama pendidikan bahasa Belanda. Dalam menjalankan kebijakan pendidikan di Hindia Belanda, pemerintah kolonial menetapkan prinsip-prinsip atau arah etis (*etische koers*) yang diterapkan dibidang pendidikan (Ary, 1986: 19). Dampaknya perluasan pendidikan bagi pribumi menyebabkan munculnya golongan terpelajar atau yang lebih dikenal dengan priyayi baru. Mereka memandang bahwa bahasa Belanda tidak hanya dilihat sebagai alat bantu untuk membuka jalan pengetahuan barat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam proses pendidikan menuju otonomi (Groeneboer, 1995: 89).

Dalam melaksanakan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi, pemerintah kolonial dianggap belum serius. Hal ini terlihat dari pemberlakuan politik stratifikasi pendidikan hingga keengganan pemerintah dalam memasukkan mata pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum sekolah secara luas di sekolah pribumi milik pemerintah (Sartono, 1987: 353). Kebijakan politik pendidikan bahasa Belanda yang diterapkan oleh pemerintah kolonial mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan termasuk pribumi golongan priyayi baru. Kelompok ini memberikan tanggapan melalui berbagai cara salah satunya melalui pers, salah satunya berasal dari Perserikatan Goeroe Hindia Belanda melalui organ

organisasinya yang berupa pers yaitu majalah *Medan Goeroe Hindia*.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini adalah metode penelitian menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2001: 83).

Pembahasan

Kehidupan masyarakat di Hindia Belanda diatur secara ketat oleh pemerintah kolonial dalam berbagai aspek, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan di Hindia-Belanda erat kaitannya dengan politik kolonial umum sehingga sarat dengan kepentingan pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Pribumi sebagai warga negara kelas ketiga (Djaja, 2007: 24) sangat merasakan dampak dari kebijakan politik yang diterapkan pemerintah. Salah satu dampak dari diberlakukan politik pendidikan bagi pribumi, adalah akses pendidikan yang diterima oleh pribumi sangatlah sulit terlebih lagi akses untuk pendidikan berbahasa Belanda. Pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi yang dilaksanakan di Hindia Belanda kurang mendapatkan perhatian.

Keadaan pendidikan bagi pribumi kurang mendapat perhatian akibat sikap

pemerintah kolonial yang menganggap bahasa Belanda tidak cocok diajarkan untuk pendidikan pribumi, hal ini dikarenakan pendidikan bahasa Belanda akan membebani pemerintah. Selain itu pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi akan mencampuri kebijakan yang menuntut *ambtenaar* Eropa untuk menambah pengetahuan akan bahasa daerah dan bahasa Melayu karena dianggap efisien dalam berkomunikasi dengan *ambtenaar* pemerintah bangsa pribumi (Groeneboer, 1995: 105).

Pada akhir abad ke 19 pemerintah membuka kesempatan untuk pendidikan bahasa Belanda terbatas kepada lapisan pribumi tinggi namun dianggap menguntungkan¹, terutama untuk kepentingan usaha serta aparat pemerintahan. Akan tetapi usaha tersebut belum terlalu berdampak signifikan karena menurut orang-orang asing yang berkunjung ke Hindia Belanda pada akhir abad ke 19 menggambarkan bahwa tidak ada satupun yang setara dengan orang Jawa dalam kesulitan berbahasa. Hal ini menggambarkan bagaimana buruknya kondisi pendidikan di

¹ Praktek pendidikan yang terbatas bagi elite pribumi ini menguntungkan pihak Pemerintah Kolonial dalam mengontrol wilayah jajahannya. Dikarenakan pihak priyayi akan semakin merasa berhutang budi kepada pemerintah kolonial atas jabatan yang diduduki sedangkan disisi lain akan menjauhkan dengan pihak rakyat biasa. Lihat Kahin, George Mc Turnan. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. (Depok: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 14.

Hindia Belanda yang masih tertinggal dibandingkan jajahan Eropa lain.

Pada awal abad ke 20 terjadi perubahan politik kolonial seiring diberlakukannya politik Etis. Berdasarkan pendapat para tokoh Etis pendidikan bagi pribumi posisinya, adalah sebagai usaha untuk membalas utang budi bagi rakyat di Hindia Belanda. Selain itu politik etis secara tidak langsung mengakibatkan penambahan kebutuhan terhadap aparat pemerintahan pribumi, seiring dengan pemerintah yang sedang membangun infrastruktur di Hindia ditambah dengan peningkatan investasi perusahaan Eropa yang masuk ke Hindia. Hal ini semakin meningkatkan permintaan terhadap pribumi yang mendapat pendidikan barat.

Penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah sudah menjadi suatu keharusan karena salah satu syarat dalam penerimaan pegawai pemerintahan adalah mampu berbahasa Belanda, selain telah menerima pendidikan Barat. Untuk itulah, sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Belanda seperti HIS, menjadi tujuan bagi kalangan pribumi agar nantinya dapat bekerja di gubernemen dengan gaji yang tinggi. Selain itu pribumi juga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Keuntungan lainnya adalah dari segi psikologis, dimana pendidikan barat diharapkan sebagai alat untuk mendapatkan penghargaan yang sama atau status yang sama dengan masyarakat Eropa (Parikitri, 1995: 230). Inilah yang menjadi alasan golongan elit pribumi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Eropa, bukan ke sekolah bumiputera sekalipun jumlah sekolah bumiputera meningkat. Selain itu, kualitas sekolah bumiputera lebih rendah dibandingkan dengan sekolah Eropa, sehingga tidak mengherankan kalau pendidikan Barat menjadi idaman bagi pribumi dalam meningkatkan status sosialnya.

Pada masa politik etis pihak kolonial menjalankan berbagai usaha untuk membalas budi kepada pihak pribumi. Namun hal ini justru membingungkan rakyat pribumi dikarenakan pemerintah kolonial merasa tahu semua yang harus dilakukan tanpa meminta saran dari pihak pribumi (Parikitri, 1995: 226). Salah satunya adalah program desentralisasi dimana birokrasi Eropa masuk kepada jabatan-jabatan yang dahulu dikuasai pribumi, hal ini berakibat kepada kekuasaan elite pribumi semakin sempit.

Program desentralisasi membuat jabatan bagi pribumi semakin sedikit, selain itu tidak ada jaminan pekerjaan di birokrasi Eropa sehingga membuat

berkurangnya daya tarik jabatan bumiputera bagi lapisan atas (Parikitri, 1995: 223-224). Disisi lain program tersebut menciptakan peluang baru bagi priyayi kecil dan rakyat biasa untuk menduduki jabatan atas (Robert, 2009: 107-108). Semakin banyaknya golongan priyayi kecil dan rakyat biasa yang menduduki jabatan tinggi, membuat pihak pribumi golongan priyayi atas semakin terancam, sehingga antipati keduanya tidak dapat dihindarkan (Parikitri, 1995: 519).

Munculnya golongan priyayi baru juga menciptakan masalah baru, dimana golongan priyayi itu mereka tidak dapat langsung diterima bekerja sebagai *Ambtenaar* di lingkungan pemerintahan kolonial maupun pemerintahan pribumi walaupun telah mendapatkan pendidikan barat. Ketidakmampuan pemerintah kolonial dalam menampung golongan terpelajar menyebabkan timbulnya rasa tidak adil akibat dari sistem diskriminasi yang dijalankan pemerintah kolonial (Bedjo, 2000: 48-49), hal ini sekaligus mendorong adanya keharusan bagi priyayi baru untuk mentransformasikan bekal yang diberikan oleh sekolah.

Peleburan dari timbulnya sikap tidak adil akibat kolonialisme serta perkembangan yang terjadi di Asia, akhirnya memupuk semangat kebangsaan dan mulai merintis kearah terbentuknya

corak masyarakat lain yang bukan kolonial (Taufik, 2012: 264). Kelompok ini memelopori semangat untuk memperjuangkan nasib bangsa mereka dan mendorong terbentuknya "*an imagined political community*" atau sebuah komunitas politik yang dibayangkan, yang dalam perkembangan selanjutnya menuju kearah proses pencarian identitas dan integrasi nasional (Anderson, 2002: XVI).

Atas dasar semangat nasionalisme, di Hindia Belanda mulai bermunculan organisasi-organisasi pergerakan yang diinisiasi oleh golongan priyayi baru. Salah satu organisasi yang muncul dan berkembang dengan semangat nasionalisme adalah PGHB, yang merupakan organisasi bagi guru pribumi pertama. PGHB hadir karena guru-guru pribumi butuh tempat yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung serta memperjuangkan aspirasi guru-guru pribumi terutama terkait dengan masalah gaji. Organisasi PGHB ini dapat ditelusuri riwayatnya dari sewaktu M. K H Soebroto, M. Admidjojo, dan M. Ng Dwidjosewojo, dengan petunjuk N. Boediardjo, mendirikan suatu perkumpulan guru di Magelang pada tahun 1910.

Pada perjalanannya perkumpulan ini dirasa memberi manfaat yang besar terutama bagi guru-guru pribumi, maka pada pertemuan selanjutnya Dwidjosewojo

mengusulkan agar keanggotaan perkumpulan ini diperluas. Usulan ini mendapatkan sambutan hangat dan dukungan dari dari kalangan guru-guru pribumi. Dengan banyaknya dukungan dari pada guru, pada bulan Desember 1911 diadakan pertemuan guru-guru di Magelang. Pada akhir pertemuan tanggal 1 Januari 1912, mereka sepakat untuk mendirikan Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) yang berkedudukan di Magelang. Tujuan dari organisasi PGHB adalah berusaha untuk memperbaiki dan menambah banyaknya pengajaran dan sekolah-sekolah di Hindia Belanda, serta berusaha memperbaiki nasib dan derajat guru-guru pribumi baik mengenai pengetahuan maupun kesejahteraan hidupnya (Ansar, 1933: 1).

Pada masa pergerakan munculnya organisasi-organisasi nasional sebagai dampak politik etis juga berimbas kepada kemunculan pers-pers nasional yang berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gagasan, cita-cita, dan program selain melalui rapat, pertemuan, diskusi, perdebatan, dan kongres dari organisasi-organisasi pergerakan tersebut. Begitu pula PGHB yang memiliki organ organisasi dengan menerbitkan surat kabar atau majalah yang dikenal dengan nama *Dwidja Oetama* yang dikelola oleh PGHB. Dalam perkembangan

selanjutnya pada tahun 1915, *Dwidja Oetama* berganti nama menjadi *Medan Goeroe Hindia*. (*Medan Goeroe Hindia*, Januari 1915: 1).

Dalam fungsinya sebagai organ organisasi PGHB, maka majalah *Medan Goeroe Hindia* difungsikan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gagasan, cita-cita, dan program dari organisasi PGHB. Maka majalah *Medan Goeroe Hindia* memuat pemberitaan mengenai kegiatan organisasi, notulen hasil rapat organisasi, surat-surat resmi dari pengurus pusat PGHB maupun yang berasal dari pengurus cabang PGHB dari berbagai daerah, maupun perkembangan terkini dari organisasi PGHB. Dalam fungsinya sebagai majalah pendidikan maka majalah *Medan Goeroe Hindia* berisi mengenai berita mengenai pendidikan terutama berita serta artikel mengenai perkembangan pendidikan di Hindia Belanda, kebijakan pemerintah kolonial terhadap pendidikan serta berita mengenai guru-guru pribumi.

Medan Goeroe Hindia juga berfungsi sebagai media advokasi yang ditunjukkan dengan beberapa rubrikasi yang memberikan wadah bagi pembaca untuk beraspirasi dengan kondisi sosial politik yang terjadi. Melalui *Medan Goeroe Hindia*, masyarakat beraspirasi meminta perbaikan pendidikan baik kepada pemerintah lokal ataupun kolonial.

Tidak hanya wadah bagi pembaca yang ingin menyalurkan aspirasinya, redaksi *Medan Goeroe Hindia* juga aktif memberikan tanggapan terhadap opini-opini kiriman dari pembaca.

Dalam pemberitaan maupun fungsi advokasi terhadap memperjuangan nasib guru maupu memajukan pendidikan bagi pribumi tentu redaktur majalah *Medan Goeroe Hindia* berhubungan langsung dengan pemerintah kolonial.

Sebagai sarana komunikasi sering kali timbul berbagai pertentangan yang dapat mengakibatkan berbagai kendala, sehingga media perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam permasalahan tersebut. Disnilah redaksi perlu mengatur kebijaksanaan redaksional, agar tidak menyebabkan terjadinya *overstimulasi* maupun *overreaksi* yang dapat meresahkan kedua belah pihak (Tommy, 2010: 15-16). Sehingga redaksi *Medan Goeroe Hindia* sebagaimana sikap PGHB sebagai induk majalah ini memillih menggunakan sikap kooperatif untuk menjalin hubungan dengan pemerintah kolonial.

PGHB dalam majalah *Medan Goeroe Hindia* mendukung perluasan pendidikan bahasa Belanda. Melalui majalah ini PGHB berharap dapat memberikan penerangan bagi masyarakat serta pengontrol bagi pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan. Semangat ini

termuat dalam artikel maupun berita yang dimuat dalam *Medan Goeroe Hindia*. Bahkan PGHB dalam kongres pendidikan pada 1918 mengusulkan agar jam pelajaran bahasa Belanda ditambah (*Medan Goeroe Hindia*, Januari 1921: 5).

Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah Kolonial yang mewajibkan lulusan HIS apabila masuk Mulo harus mengikuti *voorklas* atau kelas penyesuaian terlebih dahulu, karena lulusanya dianggap belum sesuai dengan standar siswa Eropa. Diharapkan dengan bertambahnya jam pelajaran bahasa Belanda, murid lulusan HIS dapat dianggap setara dengan lulusan siswa Eropa.

Walaupun banyak yang mendukung perluasan pendidikan dengan bahasa Belanda bagi pribumi, hal ini tidak serta merta membuat pihak pemerintah kolonial menyetujui wacana mengenai perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi. Seperti yang disampaikan Dr. Nieuwenhuis (anggota delegasi dari *Onderwijsraad*) dalam kongres pendidikan yang kedua pada tahun 1920 yang menganggap bahwa pembelajaran bahasa Belanda bagi pribumi sia-sia (*Medan Goeroe Hindia*, Januari 1921: 5).

Pernyataan Nieuwenhuis mendapat sanggahan dari M Zain perwakilan dari PGHB Pendapat M. Zain yang tertuang

dalam artikel “HIS pada Onderwijs Congres ke II (Bahasa Belanda pada HIS)” yang termuat pada majalah *Medan Goeroe Hindia* edisi Januari 1921, berisi mengenai ketidaksetujuan dan kekhawatiran apabila pendidikan bahasa Belanda dikurangi atau bahkan dihilangkan dari HIS.

Usulan mengenai perluasan pendidikan bahasa Belanda juga datang dari perwakilan PGHB yang berada di berbagai daerah. Mereka meminta organisasi PGHB untuk memperjuangkan perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi, selain itu mereka juga meminta peningkatan kualitas dalam hal bahasa Belanda bagi guru-guru (*Medan Goeroe Hindia*, April 1921: 5). Sehingga dapat dikatakan antusiasme guru-guru pribumi terhadap wacana perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi sangat tinggi.

Sebagai sebuah organisasi yang menaungi guru-guru pribumi, PGHB dan berusaha memperjuangkan aspirasi dari guru-guru anggota PGHB, termasuk wacana mengenai perluasan bahasa Belanda di HIS. Bahkan PGHB membawa permasalahan perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi kedalam persidangan besar PGHB di Bandung pada 12 Mei 1921.

Dalam persidangan tersebut perwakilan-perwakilan cabang PGHB menghendaki perluasan pendidikan bahasa

Belanda bagi pribumi terutama di HIS. Mereka berharap dengan pengajaran bahasa Belanda yang lebih luas di HIS akan membuat HIS menyamai kualitas sekolah Belanda kalau bisa lebih baik. Bahkan mereka menyetujui usulan mengenai pengajaran bahasa Belanda di *Normalschool*.

Masalah pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi juga PGHB dibawa ke pemerintahan terutama *Onderwijsraad* dan *Volksraad* atau Dewan Rakyat melalui anggota-anggotanya agar permintaan mengenai perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi dapat menemui titik terang. PGHB mengharapakan dengan meluasnya pendidikan bahasa Belanda ini pribumi dapat memperkaya kecerdasan intelektual mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan lebih baik yang selanjutnya dapat membantu menuju ke arah proses pencarian identitas dan kemerdekaan.

Melalui artikel-artikel mengenai wacana perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi dalam majalah *Medan Goeroe Hindia*, organisasi PGHB berharap pembaca dapat memahami serta mendukung perjuangan terhadap wacana perluasan pendidikan bahasa Belanda kepada pribumi. Diharapkan nantinya pemerintah kolonial dapat meninjau kembali mengenai penerapan politik

pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi dan menyetujui usul mengenai perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi.

Kesimpulan

Dalam menjalankan praktek kolonialisme di Hindia Belanda, Pemerintah Kolonial Belanda menjalankan berbagai peraturan yang dilandasi kepentingan Kolonial Belanda di Hindia Belanda. Terkadang peraturan tersebut bersifat diskriminatif, salah satunya dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dalam kebijakan politik pendidikan bahasa Belanda, dimana pemerintah kolonial menganggap pendidikan bahasa Belanda tidak cocok diajarkan dan dianggap tidak menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Seiring berjalannya waktu pemerintah memberikan akses bagi masyarakat golongan pribumi di Hindia Belanda untuk bersekolah di sekolah Belanda.

Pendidikan berbahasa Belanda tersebut pun masih terbatas karena hanya diperuntukkan bagi golongan priyayi atas. Perlakuan yang berbedapun diterima oleh murid pribumi, dimana mereka cenderung dipersulit apabila dibandingkan dengan murid dari golongan Eropa. Pada akhirnya akibat adanya permintaan serta desakan akan pendidikan bahasa Belanda maka pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah bagi pribumi yang mengajarkan bahasa Belanda secara terbatas.

Pada awal abad ke 20 terjadi perubahan arah politik di Belanda yang berpengaruh di Hindia Belanda dengan ditetapkannya Politik Etis, dimana pendidikan terutama pendidikan Bahasa Belanda dianggap sebagai pembayar utang budi bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat berbagai wacana mengenai perluasan bahasa Belanda bagi pribumi. Diantaranya adalah yang mendukung perluasan pendidikan penuh perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi, kelompok yang mendukung perluasan pendidikan bahasa Belanda akan tetapi diiringi dengan pendidikan bahasa daerah, serta kelompok yang menolak pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi.

Pemberlakuan Politik Etis turut mempengaruhi perkembangan politik di Hindia Belanda, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi yang bersifat nasionalis salah satunya adalah organisasi Perserikatan Goeroe Hindia Belanda yang merupakan organisasi perkumpulan guru guru pribumi di Hindia Belanda. Tujuan dibentuknya PGHB adalah sebagai wadah aspirasi guru dalam memperbaiki nasib mereka juga sebagai wadah untuk memperjuangkan pendidikan bagi pribumi.

Dalam menyuarakan aspirasinya PGHB memiliki majalah yang berfungsi

sebagai organ PGHB yaitu *Dwidja Oetama* yang berubah menjadi *Medan Goeroe Hindia*. Majalah ini berisi mengenai pemberitaan seputar organisasi PGHB dan kondisi pendidikan di Hindia Belanda. Dipilihnya pers sebagai media perjuangan tidak terlepas dari perkembangan pada jaman tersebut, dimana hampir organisasi pergerakan memiliki pers sebagai organ organisasi karena melalui pers proses transformasi ide, gagasan, pemikiran dapat lebih cepat diterima oleh masyarakat.

Banyak tokoh-tokoh pribumi yang mendukung perluasan pendidikan bahasa belanda bagi pribumi, salah satunya adalah PGHB. Mereka menganggap pendidikan bahasa Belanda sebagai pembuka jalan pengetahuan barat. Walaupun banyak pihak mendukung perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi, adapula pihak yang masih ragu terhadap ide perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi termasuk pemerintah kolonial. Mereka belum menganggap penting pendidikan, bahkan mereka memandang apabila pribumi diberikan pendidikan bahasa Belanda, hal ini cenderung mubadzir. Bahkan terdapat usulan untuk menghapuskan pelajaran bahasa Belanda di HIS karena menurut mereka pribumi seharusnya hanya cukup untuk tahu dan menulis dengan baik bahasa Belanda saja.

Pendapat pemerintah tersebut ditentang oleh PGHB melalui hasil rapat serta pemikiran anggota yang dipublikasikan melalui berita maupun artikel dalam majalah *Medan Goeroe Hindia* dimana mereka menganggap pendidikan bahasa Belanda sangatlah penting bagi pribumi karena dapat membuka jalan pengetahuan barat, bahkan mereka juga meminta untuk perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi. Apalagi pada zaman itu penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah sudah menjadi suatu keharusan karena salah satu syarat dalam penerimaan pegawai pemerintahan adalah mampu berbahasa Belanda, selain telah menerima pendidikan Barat.

PGHB meyakini bahwa dengan pendidikan bahasa Belanda akan membuka jalan pendidikan barat yang dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, dan nantinya diharapkan kehidupan pribumi akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu PGHB membawa permasalahan perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi ini hingga ke *Volksraad* melalui anggota-anggotanya yang berada di *Volksraad* maupun kementrian pendidikan agar perluasan pendidikan bahasa Belanda bagi pribumi dapat terealisasikan.

Daftar Pustaka

Arsip

Staasblad van Nedherlandsch Indie 1914,
No. 764, Tahun 1914

Buku

- Amir Sutarga. (1987). *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Anderson, Benedict. (2002). *Imagined Community, Komunitas-komunitas terbayang*. Yogyakarta: INSIST.
- Baudet, H dkk. (1987). *Politik Pengajaran dalam Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Obor.
- Djaja S. Meliala. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Edisi Revisi*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Djohan Makmur. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djumhur, I dan Danasuparta. (1974). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: CV Ilmu.
- Gorcum, Van dkk. (1987). *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Edisi ke 1. Diterjemahkan oleh Amir Sutarga. Jakarta: Obor.
- Groeneboer, K. (1995). *Jalan ke Barat Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950: Sejarah Politik Bahasa*. Jakarta:Eramus Taalcentrum.
- Juniarti. (2004). *Raja Banawa dari Belanda*. Semarang: Intra Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Manuel Kaisiepo. (2000). *Wahidin Sudirohusodo dan Soetomo Dari Kebangkitan Jawa ke Kebangkitan Nasional Seribu Tahun Nusantara*. Jakarta: Kompas.
- Maters, Mirjam. (2003). *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan*. Edisi ke 1. Jakarta: Hasta Mitra.
- Marwati Joened Poesponegoro, dkk. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution S. (2001). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Niel, Robert van. (2009). *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parikitri T Simbolon. (1995). *Menjadi Indonesia: Akar-Akar Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sartono Kartodirjo. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Dari Emperium Sampai Imperium)*. Jakarta: Gramedia.

Taufik. (1977). *Sejarah dan Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: Trinity Press.

Tommy. (2010). *Politik Redaksi Berita*. Malang: Pustaka Kaiswaran.

Medan Goeroe Hindia edisi Januari 1921. No. 1, Tahun X.

Medan Goeroe Hindia edisi April 1921. No. 4, Tahun X.

Persatoean Goeroe edisi Februari 1933. No. 2, Tahun III.

Majalah

Medan Goeroe Hindia edisi Januari 1915. No. 1, Tahun IV.

Reviewer



Dr. Aman, M.Pd
NIP. 197410152003121001

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd
NIP. 197706182003122001